

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BADAN KEUANGAN

2021

KOLOM 1	SKPD	Badan Keuangan																														
	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																														
	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														
	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																														
	Indikator Kinerja	Rencana Kerja (Renja) Tahun berdasarkan target yang ditetapkan pada Renstra dengan melaksanakan Monev melalui LKIP yang responsif Gender																														
	Tujuan	Meningkatkan efektifitas penyusunan rencana kerja program yang tepat sasaran melalui peningkatan pemahaman PUG dan PPRG bagi pengambil keputusan dan penyusun perencanaan serta semua pegawai untuk disebarluaskan dan ditetapkan pada kebijakan dan program																														
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Terpilah / Data Pilah Gender)	Data Umum 1 Jumlah PNS Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebanyak 67 Orang , Laki-laki 35 Orang, Perempuan 32 Orang 2 Pejabat Eselon 1, II, III dan IV sebanyak 23 Orang, Laki-laki 12 Orang, Perempuan 10 Orang 3 PNS yang melaksanakan program kegiatan (PPTK) sebanyak 15 orang, 9 Laki-laki dan 6 Perempuan 4 PNS yang pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan PUG 5 Orang, Laki-laki 3 Orang, 2 Perempuan 5 Pelaksana teknis kegiatan yang paham gender 2 orang																														
		Akses Laki-laki mendominasi akses karena jumlah pejabat eselon laki-laki lebih banyak																														
		Partisipasi Jumlah PNS pada Badan Keuangan																														
		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>L</td><td>P</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Jumlah PNS</td><td>35</td><td>32</td><td>67</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumlah pejabat eselon</td><td>12</td><td>10</td><td>22</td></tr><tr><td>3</td><td>Jumlah PPTK</td><td>9</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Pernah mengikuti pelatihan gender</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>PPTK Paham gender</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	No.	Uraian	L	P	Jumlah	1	Jumlah PNS	35	32	67	2	Jumlah pejabat eselon	12	10	22	3	Jumlah PPTK	9	6	15	4	Pernah mengikuti pelatihan gender	3	2	5	5	PPTK Paham gender	1	1	2
		No.	Uraian	L	P	Jumlah																										
		1	Jumlah PNS	35	32	67																										
		2	Jumlah pejabat eselon	12	10	22																										
		3	Jumlah PPTK	9	6	15																										
		4	Pernah mengikuti pelatihan gender	3	2	5																										
		5	PPTK Paham gender	1	1	2																										
Kontrol Laki-laki lebih banyak menjadi pelaksana teknis kegiatan daripada perempuan																																
Manfaat Penyusunan rencana kerja kegiatan diharapkan dapat menyusun rencana penganggaran dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender																																
KOLOM 3	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, kontrol, manfaat	Akses Masih rendahnya jumlah pelaksana teknis kegiatan yang mengimplementasikan perencanaan kegiatan responsif gender di lingkungan Badan keuangan karena keterbatasan kemampuan SDM terhadap gender																														

I S U G E N D E R		<p>Partispasi</p> <ul style="list-style-type: none">* Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal* Belum adanya komitmen dari SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggarannya <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none">* Belum adanya panduan yang dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja program dan kegiatan yang responsif gender* Belum optimalnya peran <i>focal point</i> PUG di Badan keuangan <p>Manfaat</p> <p>Penyusun rencana kerja Badan diharapkan mampu mendorong pelaksana teknis kegiatan menyusun rencana program kegiatan dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>																														
	KOLOM 4	Sebab kesenjangan internal (di SKPD)	<ol style="list-style-type: none">1 Belum adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penyusunan PPRG pada SKPD (hanya tersedia surat permintaan pembuatan GAP dan GBS dari P3APPKB)2 Belum adanya panduan sebagai acuan bagi pelaksana teknis kegiatan untuk menyusun RKA-SKPD yang responsif gender3 Belum berfungsinya <i>focal point</i> PUG di Badan keuangan																													
	KOLOM 5	Sebab kesenjangan eksternal	<ol style="list-style-type: none">1 Belum adanya pendampingan penyusunan PPRG pada setiap SKPD2 Tidak adanya pengawasan dari Inspektorat selaku Tim Pengawas																													
	KOLOM 6	Reformulasi Tujuan	Meningkatkan pengintegrasian Gender dalam perencanaan dan penganggaran pada Badan Keuangan																													
KOLOM 7	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none">1 Penyusunan panduan penyusunan rencana kegiatan responsif gender2 Sosialisasi pada Badan keuangan untuk dapat mengimplementasikan PPRG3 Berkoordinasi dengan SKPD <i>driver</i> PUG dan Pengawas untuk memberikan pendampingan penyusunan PPRG pada SKPD4 Mengoptimalkan fungsi <i>Focal Point</i> pada Badan keuangan																														
KOLOM 8	Data Dasar	<p>Laki-laki mendominasi akses untuk penyusunan rencana kegiatan yang responsif gender karena jumlah pelaksana teknis kegiatan laki-laki lebih banyak</p> <p>Partispasi</p> <p>Jumlah PNS Badan Keuangan</p> <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>L</th><th>P</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Jumlah PNS</td><td>35</td><td>32</td><td>67</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumlah pejabat eselon</td><td>12</td><td>10</td><td>22</td></tr><tr><td>3</td><td>Jumlah Pelaksana Teknis Kegiatan</td><td>9</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Pernah mengikuti pelatihan gender</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>PPTK paham gender</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> <p>Kontrol</p> <p>Laki-laki lebih banyak menjadi pelaksana teknis kegiatan daripada perempuan</p>	No.	Uraian	L	P	Jumlah	1	Jumlah PNS	35	32	67	2	Jumlah pejabat eselon	12	10	22	3	Jumlah Pelaksana Teknis Kegiatan	9	6	15	4	Pernah mengikuti pelatihan gender	3	2	5	5	PPTK paham gender	1	1	2
No.	Uraian	L	P	Jumlah																												
1	Jumlah PNS	35	32	67																												
2	Jumlah pejabat eselon	12	10	22																												
3	Jumlah Pelaksana Teknis Kegiatan	9	6	15																												
4	Pernah mengikuti pelatihan gender	3	2	5																												
5	PPTK paham gender	1	1	2																												

KOLOM 9	P E N G U K U R A N		<u>Manfaat</u> Penyusunan rencana kerja kegiatan diharapkan dapat menyusun rencana penganggaran dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender
	H A S I L	Output	<u>Rumusan Kinerja</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tersusunnya panduan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2 PPTK melampirkan GAP dan GBS pada KAK dan RKA kegiatannya <u>Indikator Kinerja</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Panduan penyusunan RKA-SKPD yang mempertimbangkan PPRG sebanyak 1 Dokumen 2 Jumlah PPTK yang melampirkan GAP dan GBS pada RKA kegiatan sebanyak 8 Orang
		Outcome	<u>Rumusan Kinerja</u> Meningkatnya jumlah pelaksana teknis kegiatan yang mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan dan penggarannya <u>Indikator Kinerja</u> 50% pelaksana teknis kegiatan mengintegrasikan gender dalam perencanaan penganggaran program kegiatan

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI




HERRIMAN, SH., M.Hum
NIP. 19680525 199308 1 001